

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA NAASP

Putri Ayu Agustin^{1*}, Lusi Andriyani² & Asep Setiawan³

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

²Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

*putriayuagustin12@gmail.com

ABSTRAK

*New Asia – Africa Strategic Partnership (NAASP) sangat diharapkan akan menjadi solusi yang efektif untuk hubungan negara – negara Asia – Afrika. Dengan kata lain, efektivitas NAASP sangat tergantung pada komitmen – komitmen negara anggota yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut dijadikan oleh Indonesia sebagai sarana untuk menjadi negara yang lebih bermartabat. Dilihat dari latar belakang, maka permasalahan yang akan didiskusikan adalah tentang faktor-faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama NAASP. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber primer dan sekunder serta tersier untuk dapat di cari hubungan dan faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama NAASP. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik *Library Research* dan teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Kesimpulan dari kajian ini adalah terdapat faktor – faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama tersebut yang dimulai dari tahun 2005 – 2011 antara lain; Prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat oleh ideologi/politik negara lain, mempererat hubungan kemitraan, berpotensi kerjasama antarnegara, Indonesia sebagai penegak utama kerjasama, solidaritas Indonesia sebagai negara pelopor, dan kebangkitan semangat Dasasila Bandung.*

Kata Kunci : Kerjasama regional, solidaritas Indonesia, kebangkitan KAA

ABSTRACT

*The New Asia - Africa Strategic Partnership (NAASP) is expected to be an effective solution for relations between Asian and African countries. In other words, the effectiveness of the NAASP depends very much on the commitments of the member countries involved in it. This was made by Indonesia as a means to become a more dignified country. Viewed from the background, the issue to be discussed is about the factors that drive Indonesia's active role in NAASP cooperation. Research conducted using qualitative descriptive analysis type, by analyzing data from primary and secondary and tertiary sources to be able to look for relationships and factors that encourage Indonesia's active role in NAASP cooperation. Data collection techniques using *Library Research* techniques and data analysis techniques used in this study are descriptive analysis. The conclusion of this study is that there are factors that drive Indonesia's active role in the collaboration which began in 2005-2011, including; The principle of free and active foreign policy, not bound by ideology / politics of other countries, strengthening partnership relations, potential for cooperation between countries, Indonesia as the main enforcer of cooperation, solidarity of Indonesia as a pioneer country, and the awakening of the spirit of Dasasila Bandung.*

Keywords: Regional cooperation, Indonesian solidarity, the rise of KAA

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah negara pelopor berdirinya Konferensi Asia – Afrika yang diselenggarakan pada 18 – 24 April 1955 di Bandung yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Burma, India, Pakistan dan Sri Lanka (Widjaja, 1986). Konferensi tersebut pertama kali diselenggarakan karena dorongan dari kelompok Negara-negara berkembang untuk menumpas kolonialisme dan menciptakan kemerdekaan. Dalam KAA ini melahirkan sebuah prinsip – prinsip yang dikenal dengan nama Dasa Sila Bandung yang kemudian menjadi dasar dari hubungan antara negara – negara Asia – Afrika (Roeslan Abdulgani “The Bandung Connection: Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955).

Maksud dan tujuan Konferensi Asia – Afrika adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemauan baik (*goodwill*) dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia – Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
2. Untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan Negara-negara peserta.
3. Untuk mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan-kepentingan khusus yang menyangkut mengenai rakyat Asia – Afrika, dalam hal ini menyangkut kedaulatan nasional, realisme, dan kolonialisme.
4. Untuk meninjau posisi Asia – Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini yang dapat diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerjasama internasional (Mestoko, 1985).

Dengan semangat ini pulalah Indonesia kembali menyelenggarakan berdirinya *New Asian – African Strategic Partnership* (NAASP) sekaligus sebagai peringatan ke-50 tahun KAA pada tanggal 22 – 23 April 2005 di Jakarta. Indonesia bersama Afrika Selatan

merupakan penggerak utama dalam program – program yang dilaksanakan oleh NAASP. Dari sinilah Indonesia mempunyai harapan yang besar khususnya mengenai kepentingan Indonesia dalam memperkuat hubungan dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional (<http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id>, 25 Oktober 2017)

New Asia – Africa Strategic Partnership (NAASP) sangat diharapkan akan menjadi solusi yang efektif untuk hubungan negara – negara Asia – Afrika. Dengan kata lain, efektivitas NAASP sangat tergantung pada komitmen – komitmen negara anggota yang terlibat di dalamnya. NAASP disetujui oleh para negara peserta KAA karena menyadari bahwa hubungan Asia – Afrika pada saat itu hanya fokus pada bidang politik, sehingga dengan terbentuknya NAASP, negara-negara Asia – Afrika bisa menjalin hubungan yang lebih luas lagi di bidang ekonomi, sosial, serta budaya.

Hal tersebut juga menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia sebagai salah satu negara pelopor kebangkitan negara – negara berkembang dan dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggalang solidaritas dan berperan aktif dalam tiga fokus utama kerja sama NAASP, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi, dan hubungan sosial budaya (<http://www.kemlu.go.id/id>, 25 Januari 2017).

Konferensi Asia – Afrika yang diselenggarakan di Bandung membawa arti dan dampak besar bagi Indonesia maupun situasi Internasional. Konferensi yang berdasarkan persamaan nasib telah berhasil mempersatukan sikap dengan membangun kerja sama kemitraan di antara bangsa – bangsa di wilayah Asia dan Afrika, maupun berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia (Ratna Shofi, 2005).

Dalam konteks ‘bebas aktif, KAA menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aktif dalam memelihara dan mewujudkan perdamaian dunia melalui kerja sama. Setelah

50 tahun berlangsung, KAA dianggap masih mampu dalam memberikan peran positif terhadap sistem internasional (Ratna Shofi, 2005). Hal tersebut dijadikan oleh Indonesia demi menjadi negara yang lebih bermartabat. Dilihat dari latar belakang, maka permasalahan yang akan didiskusikan adalah tentang faktor-faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama NAASP.

NAASP DAN DIPLOMASI MULTILATERAL INDONESIA

Dalam konteks global, NAASP dimaksudkan sebagai forum penting untuk menjembatani penguatan hubungan Asia dan Afrika, dan menciptakan kemitraan strategis bagi kedua benua. Sejumlah pemimpin negara – negara Asia Afrika seperti PM China Hu Jintao, Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, dan PM India Manmohan Singh telah menyarankan tentang perlunya sebuah forum kerjasama yang menghubungkan Asia dan Afrika dalam menghadapi tantangan globalisasi (Focus Group Discussion, “*Prospek NAASP Sebagai Perikat Solidaritas dan Kerja sama Asia-Afrika*”, Kementerian Luar Negeri RI, 2010).

Terbentuknya sejumlah forum internasional lain seperti *Asia Europe Meeting* (ASEM) tahun 1996, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) tahun 1989, dan *Forum for East Asia – Latin America Cooperation* (FEALAC) tahun 1999 juga telah mendorong dan memperkuat keinginan bangsa – bangsa Asia dan Afrika untuk memiliki forum kerjasama serupa sehingga tidak terdapat *missing link* antara Asia dan Afrika dalam perkembangan arsitektur regional. Dengan lahirnya Gerakan Non Blok, GNB berprinsip untuk bersedia hidup berdampingan secara damai antara berbagai sistem politik dan sosial-ekonomi di dunia ini. Dengan cara menghargai pendirian masing – masing, fiasafat hidup masing – masing, dan memperkembangkan kerjasama demi kepentingan dan keuntungan bersama (Roeslan Abdulgani, 1987).

Mulai tahun 2008, Indonesia terus melakukan pembenahan di dalam negeri. Kondisi perekonomian yang terus membaik dan demokrasi yang semakin matang berimplikasi pada semakin meningkatnya profil Indonesia di mata

dunia intrenasional. Akibatnya, Indonesia semakin diperhitungkan di berbagai forum multilateral. Modal tersebut menyediakan ruang bagi Indonesia untuk berperan secara lebih aktif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya penetapan norma – norma (*norm setting*) internasional, baik di berbagai badan dan forum PBB maupun di berbagai organisasi internasional lain di luar PBB (<https://www.kemlu.go.id/-Majalah>, 10 Januari 2017).

Peran tersebut dapat digambarkan dari terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan/dewan eksekutif atau ketua di berbagai forum multilateral penting di dunia, baik sebagai negara maupun individu. Salah satunya, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB periode 2007 – 2008. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dunia internasional atas peran Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia.

KERJASAMA REGIONAL

Dalam hubungan internasional, hubungan antar negara satu dengan negara lain membutuhkan adanya suatu ikatan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, baik kerja sama politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara bilateral maupun multilateral. Kerjasama didefinisikan sebagai praktik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bekerja di masyarakat luas dengan tujuan memunculkan suatu metode atau kesepakatan yang disetujui secara bersama. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah salah satu usaha – usaha yang dilakukan oleh negara – negara untuk menyelaraskan kepentingan – kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Ada beberapa indikator – indikator kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
2. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga

maupun pikiran akan tercipta kerjasama.

3. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing – masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas (<http://www.psychologymania.com>, 6 Oktober 2017).

Pada hakekatnya, kerja sama internasional terdapat beberapa bentuk, salah satunya, yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kedekatan geografis inilah yang sangat menentukan terjalannya kerjasama regional. Selain itu, kesamaan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara – negara yang akan bekerja sama, banyak menentukan suatu perwujudan untuk kerjasama regional (<https://www.kemlu.go.id>, 5 Oktober 2017). Dari bentuk kerjasama diatas, kerjasama regional lebih mengarah kepada kerjasama Indonesia dengan *New Asia – Africa Strategic Partnership* (NAASP). Hal tersebut pulalah yang didorong oleh kesamaan nasib antara negara – negara berkembang di kawasan. Antara Indonesia dan negara – negara Asia – Afrika lainnya memiliki potensi di berbagai bidang yang saling menguntungkan satu sama lain untuk mencapai kepentingan nasional masing – masing negara salah satunya Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia meningkatkan prioritasnya dalam kemitraan strategis baru Asia – Afrika (NAASP) yang memiliki mekanisme kerjasama kemitraan yang jelas. Dalam hal ini, Indonesia menjadikan NAASP sebagai alat untuk dapat terlibat aktif di sistem internasional serta sebagai bentuk untuk mencapai kepentingan nasional. NAASP menjadi wujud konkrit dalam pembentukan akses intra kawasan antara wilayah Asia dan Afrika dengan komitmen kerjasama dalam bidang ekonomi, solidaritas politik, dan hubungan sosial budaya. Menurut Karns dan

Mingst ada faktor politik yang mendorong kerja sama regional, yaitu (Karen A.Mingst, 2010):

1. Dinamika kekuasaan: dinamika kekuasaan memainkan peranan penting seperti bagaimana peran Indonesia pada saat terbentuknya Konferensi Asia – Afrika.
2. Identitas dan ideologi: kerjasama regional juga merupakan pernyataan identitas negara – negara dalam suatu kawasan. Seperti negara – negara yang tergabung dalam *New Asia – Africa Strategic Partnership* (NAASP) telah memiliki suatu *code of conduct* yang telah disepakati pada saat Konferensi Asia – Afrika. Dalam arti konstruktif, KTT AA mengakui adanya dinamika identitas nasional dan regional. Selain identitas, ideologi juga memainkan peran penting dalam terbentuknya kerja sama kawasan. Terbentuknya NATO dan European Union didasarkan pada ideologi liberalisme, sedangkan organisasi regional di negara – negara berkembang lebih banyak berlandaskan ideologi anti-kolonialisme dan non-intervensionisme.

KEPENTINGAN NASIONAL

Kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk memahami dan menjelaskan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Salah satu unsur yang selalu menjadi perhatian adalah kesejahteraan ekonomi. Dalam hubungan internasional, interaksi antar Negara dilakukan berdasarkan pada kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgentau menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa

diciptakan melalui teknik – teknik paksaan maupun kerja sama” (Mohtar Mas’oed, 1990).

Untuk menjawab kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama NAASP, penulis menganalisa dengan menggunakan tipe dari jenis kepentingan nasional, yaitu *Secondary interest*, merupakan suatu keinginan antara negara yang saling bekerja sama dalam mencapai suatu kepentingan bersama. Segala permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan mediasi ataupun melalui perundingan. Dalam hubungan antara negara-negara Asia – Afrika, jelas memperlihatkan adanya keinginan bersama untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan.

Kepentingan nasional suatu bangsa dan Negara muncul dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral, dalam lingkup regional maupun global. Suatu bangsa selalu berusaha menjaga dan menjalin hubungan dengan bangsa lain agar kepentingan nasionalnya dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini, bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas dalam merumuskan suatu kebijakan dan strategi yang telah disepakati bersama dalam lingkup global (thesis.umy.ac.id, 6 Mei 2017)

Mempertahankan kepentingan nasional berarti negara berusaha memegang teguh prinsip terhadap kebijakan dalam negeri untuk kelangsungan hidup negaranya, baik dalam melindungi identitas fisik maupun identitas politik. Melindungi identitas fisik, berarti negara melindungi wilayah suatu negara. Melindungi identitas politik, berarti negara berusaha mempertahankan posisi dan memperkuat postur politik di dunia internasional dan kredibilitas negara tersebut.

Selain itu, dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara, ada beberapa faktor ekonomi yang secara bersama – sama bekerja secara stimulan menjadi pendorong negara – negara masuk ke dalam organisasi regional, yaitu adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam bidang perdagangan dan investasi, kebijakan – kebijakan ekonomi saling melengkapi antar negara, adanya mekanisme kompensasi untuk integrasi ekonomi di negara – negara sedang berkembang, dan adanya keinginan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik

investor dengan cara perluasan pasar (Ambarwati,2016).

Dengan demikian, penulis menggunakan konsep ini karena kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri suatu negara yang berisi tentang kebijakan luar negeri dalam upaya mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kepentingan nasional juga menjadi awal pola interaksi atau hubungan antara negara satu dan yang lain.

ORGANISASI REGIONAL

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar satu negara dengan negara saja atau individu dengan negara, tetapi juga antara negara dan organisasi (<https://gurupkn.com>, 28 Oktober 2017). Menurut Clive Archer menyatakan bahwa: “Organisasi regional adalah organisasi yang menekankan pembatasan keanggotaan pada kawasan tertentu dalam arti geografis dan politis, organisasi negara dengan latar belakang yang sama, pembatasan keanggotaan didasarkan pada kesamaan latar belakang, semisal: sistem politik, kepentingan ekonomi, tingkat perkembangan, bahasa dan kebudayaan” (Clive Archer,2001).

Dari pengertian diatas, bahwa *New Asia – Africa Strategic Partnership* (NAASP) sebagai organisasi yang terbentuk berdasarkan ikatan geografis, keadaan politik dan beranggotakan pemerintah dari negara – negara yang berdaulat demi terwujudnya suatu kepentingan bersama. Berdasarkan kutipan diatas, bisa digambarkan bahwa NAASP didirikan berdasarkan pada Konferensi Asia – Afrika tahun 2005 sebagai bentuk dari hubungan internasional yang semakin kompleks. Serta beranggotakan pemerintah dari negara – negara yang berbadan hukum. Berdasarkan keanggotaan dan tujuan menurut Coulombis dan Wolfe organisasi internasional diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:

1. *Global Membership and general purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum, contoh: PBB.
2. *Global membership and limited pupose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and general purpose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dibidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dsb.
4. *Regional membership and limited pupose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dsb.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber primer dan sekunder serta tersier untuk dapat di cari hubungan dan faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjsama NAASP. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memperoleh wawasan (*insight*) dalam suatu masalah serta membantu mengembangkan suatu pemikiran baru atau hipotesis dalam penelitian kualitatif (Umar Suryadi Bakry,2016). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap terhadap topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Library Research* (studi/penelitian kepustakaan). Teknik analisa data yang

digunakan penelitian ini adalah deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Strategi dan Partnerhip dalam NAASP

Sebelum memahami mengenai Kerja sama Kemitraan Strategis Baru Asia – Afrika (NAASP) lebih dalam, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian dari kata – kata yang terkandung dalam NAASP itu sendiri. *The New Asian – African Strategic Partnership* mengandung arti yang berdasarkan kata strategi dan *partnerhip*. Secara etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* gabungan dari kata *stratos* (tentara) dan *ego* (pemimpin). Strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai sesuatu yang dituju. Pada dasarnya strategi merupakan sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan. Menurut James Brian Quinn, (<http://eprints.uny.ac.id>, 7 April 2017).

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan – tujuan utama, kebijakan – kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Jejaring kerja dan kemitraan pada dasarnya juga dikenal dengan istilah “*partnership*”. Secara etimologis, istilah “*partnership*” berasal dari kata “*partner*” yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Makna *partnership* jika diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian (Ambar Teguh, 2004). Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama di sutau bidang usaha atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh manfaat hasil yang lebih baik.

Dalam membangun jaringan kemitraan, diperlukan adanya prinsip – prinsip yang harus disepakati bersama agar terjalin kuat dan berkelanjutan. Prinsip – prinsip tersebut diantaranya adalah (<https://facilitatortrainingpf.wordpress.com>, 18 Oktober 2017):

1. Kesamaan visi misi, kemitraan dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi, serta tujuan organisasi. Kesamaan visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan.
2. Saling menguntungkan, merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing – masing. Jika dalam bermitra hanya satu pihak saja yang mendapat keuntungan, maka hal tersebut akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama.
3. Komitmen yang kuat, kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan – kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi dan *partnership* sama – sama memiliki suatu rencana dan tujuan bersama yang hendak dicapai agar menimbulkan efek baik satu sama lain. Kemitraan Strategis Baru Asia – Afrika (NAASP) dirancang untuk membangkitkan kembali “Semangat Bandung” yang dinilai masih relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Hal tersebut pula yang menjadikan strategi bagi Negara – negara Asia – Afrika bahwa NAASP menjadi wadah antar kawasan demi terciptanya kerja sama yang lebih erat dalam membangun suatu kawasan Asia – Afrika yang berkemajuan diberbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

KEPENTINGAN INDONESIA DA-LAM KERJA SAMA NAASP

Berdasarkan *secondary intererst*, bahwa kepentingan Indonesia di kawasan didasarkan pada asas saling bekerja sama dalam mencapai suatu keinginan bersama untuk membangun suatu kerja sama NAASP yang saling menguntungkan. Indonesia memerlukan Afrika sebagai pasar bagi produk–produknya. Indonesia juga berkepentingan untuk memelihara hubungan baik yang telah berjalan selama ini dengan negara – negara Afrika, terutama dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional maupun memperoleh dukungan dalam pencalonan

Indonesia di berbagai forum internasional. Selain itu, dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara beberapa faktor ekonomi secara bersama – sama bekerja secara stimulan menjadi pendorong negara – negara masuk ke dalam organisasi regional, yaitu adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam bidang perdagangan dan investasi, kebijakan – kebijakan ekonomi saling melengkapi antar negara, adanya mekanisme kompensasi untuk integrasi ekonomi di negara – negara sedang berkembang, dan adanya keinginan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor dengan cara perluasan pasar.

1. Menumbuhkan Investasi dan Mempromosikan Potensi Daerah

Melalui NAASP inilah negara – negara Asia – Afrika dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam berbagai bidang melalui sebuah mekanisme yang menawarkan posisi tawar yang seimbang antarnegara partisipan. Hal tersebut juga dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Selama tahun 2010, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan perekonomian sebesar 40,4% dengan nilai ekspor mencapai US\$ 98,7 miliar. Dari nilai total tersebut, sektor non-migas mampu memberikan kontribusi sebesar 82,2% dengan pertumbuhan sebesar 36,2% dan kontribusi sektor migas sebesar 17,2% dengan pertumbuhan sebesar 64,6%. Penyebab utama membaiknya kinerja perekonomian Indonesia adalah terutama pada pemulihan investasi (<http://www.kadin-indonesia.or.id>, 11 Agustus 2017).

2. Meningkatkan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia

Berlangsungnya KAA membawa arti penting bagi eksistensi politik luar negeri Indonesia sekaligus menegaskan mengenai posisi Indonesia di kancah internasional. Artinya, pandangan politik luar negeri Indonesia juga terkena dampak dari KAA. Sejak menjadi penggagas dan ditunjuk menjadi tuan rumah KAA, nama Indonesia menjadi lebih “dipandang” atau diperhitungkan di kancah internasional, khususnya dalam

kawasan Asia dan Afrika (Abdulgani, Roeslan. 1981). Hal ini dapat dibuktikan dengan naiknya intensitas kunjungan luar negeri, mulai dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan hubungan internasional Indonesia dapat dikatakan semakin aktif, baik dalam mengikuti forum – forum internasional ataupun kegiatan – kegiatan yang menyangkut kepentingan Indonesia dalam sebuah kerja sama antar kawasan Asia – Afrika (Abdulgani, Roeslan. 1981).

Kepentingan nasional suatu bangsa atau negara muncul dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral, dalam lingkup regional maupun global. Pada tataran bilateral, Indonesia terus secara berkesinambungan memelihara dan meningkatkan hubungannya dengan Afrika. Indonesia saat ini telah membuka hubungan diplomatik dengan 40 negara di Afrika dan telah memiliki perwakilan RI di 17 negara Afrika (11 di Sub-Sahara Afrika Utara). Pada tataran multilateral, Indonesia telah memprakarsai Kemitraan Strategis Baru Asia – Afrika (NAASP), sebagai jembatan kerja sama antara kedua kawasan (<https://www.kompasiana.com/wibiono>, 21 September 2017).

Konferensi Asia – Afrika telah melahirkan suatu kerja sama kemitraan strategis baru dalam bentuk NAASP. Hal tersebut identik dengan keberadaan Indonesia yang mampu mensejajarkan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia telah mengambil peran sebagai bangsa yang mempelopori ‘persahabatan antar bangsa’ dengan memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Asia – Afrika (Arsip, 2016).

FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG PERAN AKTIF INDONESIA

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara berdaulat untuk melakukan hubungan dengan negara lain serta dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri. Politik luar negeri suatu negara cenderung bersifat tetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain dalam konteks hubungan internasional (<http://ropeg.kkp.go.id>, 20 Desember 2017) Landasan idiil PLNRI adalah berlandaskan pada Pancasila, yaitu sila kedua berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

Dalam menjalankan hubungan internasionalnya, Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurut Hatta, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “aktif” berarti upaya ikut serta dalam menjaga perdamaian, mengembangkan persahabatan, melakukan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain serta meredakan ketegangan kedua blok. Politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemerdekaan bangsa – bangsa dari penjajahan, mempererat hubungan dengan bangsa – bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah.

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasikan dalam PLNRI, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional PLNRI yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Setelah berakhirnya Masa Orde Baru, kemudian digantikan oleh Orde Reformasi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa itu terdiri dari dua kabinet yaitu: Kabinet Gotong Royong (2001 – 2004) yang menjalankan PLNRI melalui: Ketetapan MPR No.I/MPR/1999 yang menegaskan pada faktor

– faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU No.37 tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan kepastian hukum dalam perjanjian internasional (<https://www.ejournal.undip.ac.id>, 7 Mei 2017).

Kabinet yang kedua adalah Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2009). Dalam kabinet ini meletakkan landasan operasional PLNRI pada tiga rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu:

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Melalui Presiden SBY, dalam menjalankan PLNRI yang bebas dan aktif, beliau menggunakan prinsip konstruktifis. Melalui prinsip tersebut politik luar negeri Indonesia lebih bersifat “*soft diplomacy*” yang menjalankan tindakan – tindakan dengan cara persuasif dan preventif. Dengan pelaksanaan “*soft diplomacy*” dalam prinsip PLNRI bebas aktif, hal tersebut akan membantu Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis dengan kawasan lain di wilayah Asia maupun Afrika.
2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan SBY politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan berorientasi kepada pembangunan hubungan/komunitas

regional yang lebih komprehensif terutama pada ASEAN dan tak terkecuali dengan wilayah – wilayah lainnya. Hubungan kerjasama dibangun diberbagai bidang salah satunya pada pembangunan ekonomi satu sama lain. Oleh sebab itu, Indonesia mengajak dan menyerukan pada dunia internasional untuk menyatukan gagasan/ide bersama demi terwujudnya suatu kesejahteraan dan kemakmuran.

3. Komitmen terhadap pelaksanaan perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen dalam menjalankan perdamaian dunia dinilai berkesinambungan dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Tidak Terikat Oleh Ideologi Manapun di Dunia

Politik luar negeri Indonesia memegang prinsip “bebas aktif” dalam pelaksanaannya. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kepada ideologi atau blok manapun, terutama pada masa Perang Dingin berlangsung. Dimana pada masa itu diwarnai oleh dua blok, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat, Eropa Barat dan negara – negara kapitalis lainnya) dan Blok Timur (<http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id>, 27 Oktober 2017). Indonesia sendiri sudah menetapkan kebijakan luar negerinya sejak awal masa kemerdekaannya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pidato Bung Hatta pada tahun 1948 mengenai prinsip “bebas aktif” dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selain itu pula pada awal tahun 50-an, pada masa Kabinet Sukiman tahun 1952 dan pidato

Soekarno pada 17 Agustus 1952, yang semuanya setuju bahwa Indonesia tidak memihak kepada blok manapun, tidak berdasarkan kepentingan asing, dan turut serta aktif dalam menghapus penjajahan dan menciptakan perdamaian dunia berdasarkan pada kemerdekaan dan keadilan sosial, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945. Kemudian daripada itu Indonesia membentuk *non-alignment*/ Gerakan Non Blok pada September 1961. Namun dalam realita pelaksanaannya pasti terdapat situasi dan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi pada saat itu bahkan hingga saat ini mengingat sekarang telah memasuki era globalisasi.

Memperkuat Hubungan Kemitraan

Perlu diketahui bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan antar kawasan, di era globalisasi ini kita tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan hubungan yang erat guna mendukung pembangunan. Hal ini harus dicapai melalui dialog yang tulus dan kerjasama internasional atas dasar kepentingan dan manfaat timbal balik. Dalam menumbuhkan semangat solidaritas, kerjasama, dan rasa tanggung jawab, kemitraan global harus bersandar pada pemahaman bersama tentang kemanusiaan dan rasa saling menghormati. Kemitraan harus melibatkan berbagai kalangan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga orang – orang kelas ekonomi rendah, peyandang catat, perempuan, kalangan masyarakat sipil, komunitas lokal, kelompok marjinal, lembaga multilateral, kalangan bisnis, akademisi, dan kalangan swasta lainnya.

Empat perubahan pertama lebih banyak dilaksanakan di lingkup nasional, sementara perubahan kelima mensyaratkan adanya kolaborasi secara global. Maka dari itu, demi terciptanya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan, seluruh negara anggota

diperlukan saling terlibat dalam mengimplementasikan kesepakatan kerjasama sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing – masing guna menunjukkan kontribusinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama. Di era globalisasi yang ditandai peningkatan peran aktor – aktor non-negara, kemitraan global perlu melibatkan bukan hanya negara melainkan juga masyarakat dari berbagai kalangan.

Solidaritas Indonesia Sebagai Negara Pelopor

Sebagai wujud komitmen terhadap Dasasila Bandung dan NAASP serta menjunjung tinggi solidaritas bagi negara – negara yang bergabung dalam KTT AA, Pemerintah Indonesia menyediakan dan memfasilitasi berbagai program pengembangan kapasitas atau *capacity building program*, sumber daya manusia dan bantuan teknik lainnya. Sebagai negara pelopor, Pemerintah Indonesia diharuskan terlibat aktif dalam melaksanakan serta membagikan berbagai pelatihan internasional yang melibatkan peserta dari negara – negara Asia – Afrika di berbagai bidang yang menjadi kapasitas unggulan Indonesia serta disesuaikan dengan kebutuhan negara – negara penerima program pelatihan dimaksud.

Indonesia aktif terlibat dalam politik global sebagaimana amanat konstitusi untuk mendukung perdamaian dunia. Salah satunya, Indonesia aktif melakukan kebijakan politik luar negeri guna mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Baik pemerintah, DPR, lembaga non pemerintah, dan media di Indonesia untuk memberikan pesan perdamaian mendukung Palestina (<http://ic-mes.org/politics>, 17 September 2017). Dalam Sidang Majelis Umum PBB, KEMLU mengambil sikap mendorong penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Selain sikap politik, Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina.

Kebangkitan Semangat Dasasila Bandung

Semangat Dasa Sila Bandung dinilai masih relevan sebagai suatu landasan dari kemitraan baru antara kedua wilayah. Dimana di era globalisasi ini muncul berbagai macam tantangan baru yang perlu dihadapi bersama. Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip ini dalam menjalankan hubungan diplomasinya. Dimana sebagian besar negara di kedua benua Asia dan Afrika perlu menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung yang didasari oleh situasi ekonomi, pembangunan, sosial, dan politik terbaru serta kesejahteraan bersama lainnya (<http://theglobal-review.com>).

KESIMPULAN

Kesimpulan terkait dengan NAASP dan faktor – faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama tersebut yang dimulai dari tahun 2005 – 2011 antara lain; Prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat oleh ideologi/politik negara lain, mempererat hubungan kemitraan, berpotensi kerjasama antarnegara, Indonesia sebagai penegak utama kerjasama, solidaritas Indonesia sebagai negara pelopor, dan kebangkitan semangat Dasasila Bandung. Berbagai kegiatan atau program – program yang telah dilaksanakan oleh Indonesia merupakan sebagai bukti dari peran aktif Indonesia dalam kerja sama NAASP. Setiap kerja sama yang terjalin, baik dalam lingkup negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah maupun antar *people to people contact* selalu mempunyai tujuan yang satu, yaitu untuk mencapai kepentingan bersama demi tercapainya suatu kawasan yang lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain – lain. NAASP tetap merupakan sebuah forum yang penting dan potensial bagi kerja sama antar negara-negara di kedua benua. Dalam dunia yang berubah, tentu NAASP, seperti forum internasional lainnya, memiliki kewajiban untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada pada masa kini. Tidak diragukan lagi dalam isu Palestina, masalah kebebasan dan kemerdekaan tetap menjadi prioritas utama bagi NAASP. Bagi yang lain, isu stabilitas, sebagaimana juga kesejahteraan masyarakat Asia dan Afrika adalah merupakan

tema utama bagi kerja sama yang membawa kedua benua untuk dapat bersama. Indonesia berkeyakinan bahwa dengan bekerja bersama-sama kedua benua dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, “*Pengantar Hubungan Internasional*”. Malang: Intrans Publishing, 2016. Hlm. 214.
- Ambar Teguh Sulistiyani, “*Kemitraan dan Model – model Pemberdayaan*”. Gaya media: Yogyakarta, 2004. Hlm. 129.
- Drs. A.W. Widjaja, “*Indonesia Asia Afrika Non Blok: Politik Bebas Aktif*”, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 25.
- Dr. H. Roeslan Abdulgani, 1987, “*Indonesia Menatap Masa Depan*”. Jakarta: Merdeka Saran Usaha, hlm. 314.
- Inayah, Ratna Shofi. 2005. “*Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia*”, dalam *Jurnal Penelitian Politik: Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. 2 (1), pp. 35-49.
- Ica Wulansari, 2015, “*(Jurnal) Komunikasi Internasional Indonesia untuk Palestina*”. Diakses dari <http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina/>. Pada tanggal 17 September 2017.
- Margaret P.Karns dan Karen A.Mingst, “*International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*”, London: Lynne Rienner Publisher, 2010, hlm. 148-151
- Mohtar Mas’oed, 1990, “*Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*”. Jakarta: LP3ES, hlm. 139
- Roeslan Abdulgani “*The Bandung Connection: Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, MKAA – Dirjen Diplomatik Kementeri RI*, 2015.
- Sumarsono Mestoko, “*Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*”, Pustaka Sinar Harapan (Anggota IKAPI), Jakarta, 1985, hlm. 115
- Umar Suryadi Bakry, “*Metode Penelitian Hubungan Internasional*”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

- Focus Group Discussion, “*Prospek NAASP Sebagai Perikat Solidarias dan Kerja sama Asia-Afrika*”, Kementerian Luar Negeri RI, 2010.
- Reni Windiani, “*Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*”. Diakses dari <https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>. Pada tanggal 7 Mei 2017.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *op.cit*.
- Damar Kusumawardani, “*Konferensi Asia – Afrika dan Peningkatan Peran Indonesia dalam Sistem Internasional*”. Diakses dari http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-171143-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II-Konferensi%20AsiaAfrika%20dan%20Peningkatan%20Peran%20Indonesia%20dalam%20Sistem%20Internasional.html. Pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Kementerian Luar Negeri RI, 2011, “*Kebijakan Kerja sama Regional*”, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/NAASP.aspx>. Pada tanggal 25 Januari 2017.
- Diplomasi Mulilateral (Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) <https://www.kemlu.go.id/Majalah/Buletin%20Diplomasi%20Mulilateral%20Vol%20II%20No.%20%20>. Diakses pada 10 Januari 2017.
- <http://www.psychologymania.com/2013/02/indikator-indikator-kerja-sama.html>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.
- Kementerian Luar Negeri RI, “*Kerja sama Regional*”. Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/default.aspx>. Pada tanggal 5 Oktober 2017.
- <thesis.umy.ac.id/datapublik/t22456.pdf>. pada tanggal 6 Mei 2017.
- <https://gurupkn.com/hubungan-internasional-dan-organisasi-internasional>. Dikases pada 28 Oktober 2017.
- Clive Archer, “*Internastional Organization*”. London: Routledge, 2001.
- Y Lusi Widhiyanti, “Manajemen Strategi”, diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/8632/3/BAB%20%20-%2008417141011.pdf>. pada tanggal 7 April 2017.
- Anonim, 2015, “*Membangun Jaringan Kemitraan*”. Diakses dari <https://facilitatortrainingpf.wordpress.com/2015/04/22/membangun-jaringan-kemitraan/>. Pada tanggal 18 Oktober 2017.
- <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-168-4757-18112010.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.
- Abdulgani, Roeslan. 1981. “Sekitar Konferensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam *Analisa*, vol. 4, pp. 311-328. Diakses dari http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-171143-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II-Konferensi%20AsiaAfrika%20dan%20Peningkatan%20Peran%20Indonesia%20dalam%20Sistem%20Internasional.html. Pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Prof. Suprpto Martosetomo, 2015, “*Pemajuan Hubungan Ekonomi Indonesia-Afrika*”. Diakses dari https://www.kompasiana.com/wibiono/pemajuan-hubungan-ekonomi-indonesia-afrika_55113a35813311793cbc751e. Pada tanggal 21 September 2017.
- Arsip, 2016, “*Arsip: Harmoni, Persahabatan, dan Solidaritas*”. Edisi 69/Mei-Agustus-2016, hlm.6.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “*Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar negeri Terutama Kerjasama Negara – negara ASEAN*”. Diakses dari http://ropeg.kkp.go.id/asset/source/2017/ujian_dinas/Perkembangan%20politik%20luar%20negeri%20terutama%20kerjasama%20negara-negara%20ASEAN.pdf. Pada tanggal 20 Desember 2017.
- Damar Kusumawardani, 2017, “*Konferensi Asia – Afrika dan Peningkatan Peran*

Indonesia dalam Sitem Internasional". Diakses dari [\[lam%20Sistem%20Internasional.html\]\(http://damarkusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-171143-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II-Konferensi%20AsiaAfrika%20dan%20Peningkatan%20Peran%20Indonesia%20dalam%20Sistem%20Internasional.html\). Pada tanggal 27 Oktober 2017.](http://damarkusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-171143-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II-Konferensi%20AsiaAfrika%20dan%20Peningkatan%20Peran%20Indonesia%20da-</p></div><div data-bbox=)

Tim KAA, *loc.cit.* https://ktln.setneg.go.id/berita_kaa.html.http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=17390&type=99#.WkX8mTQxXMw